Judul : Alat Kelengkapan Dewan Dibahas Pekan Depan Ya
Tanggal : Sabtu, 05 Oktober 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7



Dipastikan Puan

Alat Kelengkapan Dewan Dibahas Pekan Depan Ya...

KETUA DPR Puan Maharani memastikan, pembahasan terkait pembentuan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bersama fraksi-fraksi di DPR segera dilakukan. Pembahasan kemungkinan besar mulai dilakukan pada Rapat Pimpinan (Rapim) awal pekan depan.

Adapun AKD antara lain Pimpinan DPR untuk koordinasi seluruh bidang-bidang di DPR, antara lain Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan, Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR 1 Oktober lalu, telah terpilih Ketua DPR dari Fraksi PDIP Puan Maharani dan empat wakilnya yakni Rachmad Gobel (Nasdem), Aziz Syamsuddin (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra).

"Nanti prosesnya kami akan lakukan dulu (pembahasan) di rapat pimpinan, Senin atau Selasa (pekan depan) untuk kemudian bertemu juga rapat konsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi menentukan pembentukan komisi-komisi. Sesudah itu disepakati, baru kami akan melakukan pembentukan AKD-AKD," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Untuk jumlah Komisi, mitra kerja dan ruang lingkup tugas komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara. Selanjutnya AKD Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan ANggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Puan tidak bisa memastikan berapa lama proses pembentukan AKD lantaran sangat tergantung dengan dinamika yang terjadi dalam pembahasan antar fraksi. Namun dia optimistis pembentukan AKD dapat berjalan dengan lancar.

"Tergantung dinamika yang di lapangan. Insyaallah semuanya bisa kita lakukan secara musyawarah mufakat. Sehingga, tidak ada hal-hal yang perlu berlama-lama, tapi untuk terlalu cepat enggak perlu juga karena kan nanti pemerintahan periode selanjutnya juga akan baru dimulai 20 Oktober 2019," katanya.

Tidak hanya itu, dia juga memastikan pembentukan AKD DPR tidak menunggu komposisi kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kalaupun nanti ada pelebaran di kabinet, Puan memastikan tidak akan berpengaruh terhadap jumlah komisi di DPR. Sebab kementerian tersebutlah yang nanti akan bersinergi atau berkoordinasi dengan komisi-komisi yang ada di DPR.

"Oh tidak (menunggu pembentukan kabinet), kami yang akan memulai duluan," tambah eks Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto menjelaskan, mekanisme pemilihan pimpinan AKD akan ditentukan berdasarkan jumlah perolehan kursi terbanyak. Karena PDI Perjuangan merupakan peraih kursi terbanyak di parlemen, maka berhak mendapatkan jumlah pimpinan yang banyak pula. "Cuma pembahasan, nya minggu depan misalkan PDIP dapat berapa nanti Insya Allah minggu depan," kata Yandri.

Menurut Yandri, mekanisme Pimpinan MKD kemungkinan besar akan dikalkulasi berdasarkan penghitungan kursi pemilu lalu berdasarkan sistem proporsional di mana pembagiannya dibagi secara merata kepada seluruh fraksi berdasarkan perolehan jumlah kursi di DPR. Diurutkan secara bergantian dari yang terbanyak hingga terendah dan begitu seterusnya masing-masing Komisi dan 5 AKD lainnya. ■ KAL